

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 6, No.2, November 2020

ISSN: 2476-9320

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 2 November 2020

- Pembina** : H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Dra. Hj. Nelly
Syamsurijal, S. Ag. M.Si.
Dr. Sabara, M. Phil.I
Sitti Arafah, S. Ag, MA.
- Editor/Penyunting** : Prof. Dr.H. Abd. Kadir Ahmad, MS.
Paisal, SH.
Muh. Ali Saputra, S. Psy
Muh. Dachlan, SE. M.Pd.
- Kesekretariatan** : Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Asnianti, S. Sos.
Zakiah, SE.
Azruhyati Alwy, SS.
Dr. Elce Yohanna Kodina, M.Th.
- Layout** : Zulfikar Kadir, SH.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

SALAM REDAKSI

Jurnal Mimikri pada edisi kali ini mengangkat tema seputar *Pandemi Covid-19* yang diulas dengan beragam perspektif, mulai dari tinjauan agama, sosial, maupun budaya. Komitmen Jurnal Mimikri sebagai jurnal yang bergenre kajian agama dan kebudayaan untuk mengangkat tema atau isu aktual dalam bahasan ilmiah sebagai bentuk dedikasi dan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diketahui, memasuki 2020 dunia dikejutkan dengan terjadinya Pandemi Covid-19 yang secara cepat dan massif menyebar di seantero dunia, termasuk di Indonesia. Covid-19 yang bermula di Wuhan, Tiongkok akhir 2019, masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi problem medis *an sich*, namun pengaruhnya sangat signifikan pada berbagai aspek kehidupan manusia. Tatanan sosial, budaya, bahkan agama seketika mengalami perubahan dan memestikan masyarakat global untuk beradaptasi. Ketidaksiapan dalam menghadapi efek pandemi akan mengakibatkan disorganisasi sosial pada seluruh aspek kehidupan. Berbagai persoalan tersebut memicu transformasi secara cepat dalam bentuk yang sangat berbeda dari kondisi sebelumnya.

Beberapa tulisan dalam edisi Mimikri kali ini mengulas fenomena, pengalaman, hingga dampak sosial sebagai efek dari Pandemi Covid-19. Tinjauan agama, budaya, dan studi sosial menjadi perspektif yang mengemas dan membingkai tema Pandemi Covid-19. Tulisan Sabara berjudul *Beragama dengan Moderat di Era Pandemi Covid-19* menggunakan pendekatan moderasi beragama dalam menyoroiti Pandemi Covid-19. Situasi pandemi menjadi ruang kontekstualisasi keberagamaan yang moderat untuk menjawab problem sosio-religius, sekaligus menjadi salah satu pendekatan solutif berbasis agama dalam menyikapi Pandemi Covid-19.

Tulisan kedua dari Syamsurijal tentang, *Religiousitas yang Naif: Ortodoksi Masyarakat Muslim di Tengah Bayang-bayang Pandemi Covid-19*. Tulisan tersebut menggaambarkan situasi Pandemi Covid-19 yang semakin memperjelas tentang adanya fakta ortodoksi beragama (sebagai kebalikan dari moderasi beragama) di tubuh umat Islam. Sebagian umat Islam masih belum siap untuk menjadikan agama beradaptasi dengan konteks sosial yang *extra ordinary* seperti situasi sosial yang diakibatkan Pandemi Covid-19.

Situasi Pandemi Covid-19 ikut memengaruhi pelaksanaan tradisi pernikahan. Sitti Arafah melalui tulisan *Pernikahan "Bersahaja" di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Bugis di Kota Palopo*, menjelaskan adaptasi kultural dari tradisi pernikahan masyarakat Bugis pada masa Pandemi Covid-19. Meski mengalami berbagai penyesuaian akibat protokol Covid-19, proses pernikahan yang dilangsungkan tetap dalam suasana yang sakral, baik dari segi agama maupun budaya.

Melalui tulisan berjudul *Tubuh-tubuh yang Patuh: Pengalaman Pasien Sembuh Covid-19*, Muh. Irfan Syuhudi mengangkat pengalaman karantina pasien tanpa gejala yang sembuh dari Covid-19. Tulisan tersebut mengeksplorasi proses terapi dan suasana psikologis pasien melalui masa karantina. Lingkungan sosial yang memberi *support* cukup memengaruhi proses terapi dan suasana psikologis pasien tersebut.

Pengalaman penanggulangan Pandemi Covid-19 pada sebuah desa diulas oleh Paisal dalam tulisannya yang berjudul *Desa Labbo Melawan Covid-19: Kebijakan Penanggulangan dan Kepatuhan Warga Desa*. Kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas sosial masyarakat, termasuk syiar keagamaan berefek pada aktivitas warga di bulan Ramadan menjadi kurang semarak dan meriah.

Efek Pandemi Covid-19 pada dunia pendidikan diulas oleh Muhajir yang mengangkat problem kesenjangan digital dalam pembelajaran daring. Muhajir mengangkat tulisan berjudul *Pembelajaran Daring di Era Covid-19: Kesenjangan Digital, Sistem Kompetisi, dan Model Pendidikan yang Manusiawi*. Tulisan tersebut menunjukkan lebarnya kesenjangan digital di Indonesia yang melahirkan kompetisi antar peserta didik yang tidak adil, sehingga perlu dipertimbangkan model pendidikan yang lebih manusiawi.

Efektivitas implementasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai daerah disoroti oleh Athoillah Islamy, Kusroh Lailiyah, dan M. Syamsul Rizal dengan tulisan berjudul, *Problem Efektivitas Pencegahan Covid-19 di Indonesia dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Studi Analisis Kebijakan PSBB*. Ketidakefektifan penerapan PSBB disebabkan empat aspek problem, yaitu; kaidah hukum, penegak hukum, kesadaran masyarakat, dan problem sarana.

Mimikri edisi kali ini dilengkapi duai tulisan suplemen bertema *Media Online dan Pembentukan Paham Keagamaan Siswa Madrasah Aliyah*. Tulisan Muh. Ali Saputra berjudul *Media Daring dan Pembentukan Paham Keagamaan Siswa Madrasah Aliyah di Kota Samarinda*. Melalui tulisan tersebut, Ali Saputra memaparkan media daring tidak memberi dampak eksklusif bagi pembentukan paham keagamaan siswa Madrasah Aliyah. Keaktifan guru dalam memantau postingan siswa di akun media sosialnya serta regulasi pihak madrasah terkait penggunaan gawai cukup efektif memfilter pengaruh media daring terhadap pembentukan radikalisme paham keagamaan siswa.

Muhamamd Dachlan mengangkat tulisan berjudul *Media Online dan Pembentukan Pemahaman Keagamaan Siswa di MAN I Kota Ambon*. Dalam tulisan tersebut, Dachlan memaparkan bahwa media online memberikan pengaruh positif dalam membentuk paham keagamaan siswa yang moderat. Peran guru cukup penting dalam mendorong siswa untuk mengakses konten-konten keagamaan bernuansa moderat di media online.

Akhirnya, semua tanggapan berpulang pada pembaca. Ekspektasi redaksi semoga kumpulan tulisan dalam Jurnal Mimikri edisi kali ini dapat memberi kontribusi baik teoretis maupun praktis bagi pengembangan keimuan dan kebijakan terkait setiap tema aktual yang diangkat.

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-9320

Vol. 6, No. 2 November 2020

DAFTAR ISI

SABARA

BERAGAMA DENGAN MODERAT DI ERA PANDEMI COVID-19

Halaman 131 – 149

SYAMSURIJAL

RELIGIOSITAS YANG NAIF: ORTODOKSI
MASYARAKAT MUSLIM DI TENGAH BAYANG-BAYANG
PANDEMI COVID-19

Halaman 150 - 170

SITTI ARAFAH

PERNIKAHAN “BERSAHAJA” DI MASA COVID-19
PADA MASYARAKAT BUGIS DI KOTA PALOPO

Halaman 171 - 188

MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI

TUBUH-TUBUH YANG PATUH: PENGALAMAN
PASIEN SEMBUH COVID-19

Halaman 189 - 204

PAISAL

DESA LABBO MELAWAN COVID-19:
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN
KEPATUHAN WARGA DESA

Halaman 205 - 219

MUHAJIR

PEMBELAJARAN DARING DI ERA COVID-19:
KESENJANGAN DIGITAL, SISTEM KOMPETISI, DAN
MODEL PENDIDIKAN YANG MANUSIAWI

Halaman 220 - 234

____ATHOILLAH ISLAMY, KUSROH LAILIYAH DAN M. SYAMSUL RIZAL____

**PROBLEM EFEKTIVITAS PENCEGAHAN COVID-19
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM
(STUDI ANALISIS KEBIJAKAN PSBB)**

Halaman 235 - 248

____MUHAMMAD ALI SAPUTRA____

**MEDIA DARING DAN PEMBENTUKAN PAHAM
KEAGAMAAN SISWA MADRASAH ALIYAH
DI KOTA SAMARINDA**

Halaman 249 - 264

____MUHAMMAD DACHLAN____

**MEDIA ONLINE DAN PEMBENTUKAN PEMAHAMAN
KEAGAMAAN SISWA DI MAN 1 AMBON**

Halaman 265 - 276

PEMBELAJARAN DARING DI ERA COVID-19: KESENJANGAN DIGITAL, SISTEM KOMPETISI, DAN MODEL PENDIDIKAN YANG MANUSIAWI

Muhajir

Pascasarjana Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar
Jalan BontoLangkasa, Rappocini Makassar
Email: muhajirunm@gmail.com

Abstrak

Pembelajaran daring (*online learning*) menjadi sistem pembelajaran alternatif di masa Covid-19. Pembelajaran daring ternyata memunculkan banyak masalah dalam implementasinya. Pembelajaran daring tak hanya dipandang negatif oleh sebagian masyarakat, namun juga menunjukkan kesenjangan digital (*digital divide*) yang lebar di masyarakat. Kesenjangan tersebut akhirnya menghasilkan ketimpangan pendidikan. Peserta didik miskin dan mereka yang tinggal di daerah pedalaman dan terluar sulit mengakses pembelajaran daring karena ketiadaan sarana TIK dan kesulitan mendapatkan sinyal internet. Pendidikan di Indonesia yang sejak awal menganut sistem kompetisi berparadigma neoliberal, akhirnya menghasilkan persaingan yang tidak adil di dalam pembelajaran daring akibat kesenjangan digital. Tulisan ini hendak menunjukkan lebarnya jurang kesenjangan digital di Indonesia, yang kemudian menghasilkan ketimpangan dalam persaingan antar peserta didik. Tulisan ini sekaligus menjelaskan perlunya pemerataan infrastruktur telekomunikasi, penuntasan kesenjangan ekonomi, dan mengevaluasi sistem kompetisi dalam pendidikan yang selalu diskriminatif dan hanya menguntungkan sebagian orang saja, kemudian memikirkan ulang model pendidikan yang lebih manusiawi.

Kata kunci: pembelajaran daring, kesenjangan digital, pendidikan, sistem kompetisi

PENDAHULUAN

Sudah tujuh bulan berlalu Indonesia dilanda Covid-19. Diketahui, Indonesia pertama kali mengonfirmasi adanya kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020. Setelah itu, kasus Covid-19 terus bertambah. Per 29 Oktober 2020, kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 404.048 orang, dan sebanyak 60.569 kasus aktif yang terkonfirmasi positif (kompas.com/29/10/2020). Dampak Covid-19 pun sudah sangat mengkhawatirkan, di samping banyak

yang meninggal dunia, pandemi ini juga berdampak besar pada kondisi ekonomi di Indonesia, pun berdampak besar pada dunia pendidikan.

Sejak Covid-19 mulai tak terkendali, Pemerintah Indonesia akhirnya mengeluarkan kebijakan agar proses pembelajaran dalam satuan pendidikan digelar secara daring (dalam jaringan atau *online*). Mulanya, pembelajaran daring (*online learning*) seolah-olah tak ada masalah. Apalagi pada dasarnya,

pembelajaran daring memiliki sisi positif, yakni pembelajaran bisa dilakukan secara jarak jauh. Sehingga kebutuhan pendidikan peserta didik bisa terpenuhi, meski harus menerapkan *social distancing/physical distancing*. Namun, lama kelamaan, pembelajaran daring di era Covid-19 mulai menunjukkan sejumlah masalah pendidikan yang selama ini kerap dikritisi, namun diabaikan: kesenjangan dan ideologi kompetisi.

Pembelajaran daring menunjukkan jurang pemisah antara si miskin dan si kaya dalam dunia pendidikan. Kesenjangan ekonomi di dalam masyarakat semakin kentara. Di sisi lain, pembelajaran daring juga menunjukkan kesenjangan digital yang cukup parah di Indonesia, negara dunia ketiga yang selama ini suka menggembar-gemborkan ambisi menuju Revolusi Industri 4.0. Kesenjangan tersebut kemudian berdampak pada kompetisi pendidikan yang tidak adil ketika pembelajaran daring dilaksanakan. Orang miskin kesulitan mendapatkan pembelajaran yang memadai karena tak memiliki oleh sarana teknologi seperti komputer dan gawai (*gadget*) untuk terlaksananya pembelajaran daring: kesenjangan digital sudah mulai nampak. Jika pun peserta didik memiliki sarana teknologi, namun lagi-lagi terkendala oleh jaringan internet akibat dari salah satu bentuk kesenjangan digital di Indonesia.

Peserta didik di pedesaan dan di daerah terluar, misalnya kesulitan mengakses internet untuk memulai pembelajaran daring karena infrastruktur internet yang belum memadai. Akibatnya, orang miskin dan peserta didik di daerah pedalaman dan terluar tak bisa bersaing dengan mereka yang kaya dan berada di daerah dengan akses internet yang baik.

Kajian ini hendak menjelaskan bagaimana pembelajaran daring di era Covid-19 akan menghadirkan kompetisi pendidikan yang tidak adil, tidak sehat, dan membebani akibat dari kesenjangan digital. Kesenjangan tersebut membuat sebagian peserta didik kesulitan mengakses pendidikan dengan baik, dan akhirnya mereka yang tak diuntungkan akan semakin sulit bersaing. Kajian ini juga sekaligus menjelaskan perlunya pemerataan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia, penuntasan kesenjangan ekonomi, dan mengevaluasi sistem kompetisi dalam dunia pendidikan kita, sekaligus mengajak kalangan untuk memikirkan kembali model pendidikan yang lebih manusiawi sesuai tujuan asasi dari pendidikan.

PEMBAHASAN

Pembelajaran Daring dan Persepsi Negatif

Covid-19 mengharuskan semua orang melakukan *physical distancing* atau

jarak fisik untuk meminimalisasi penyebaran virus tersebut. Otomatis setiap orang dianjurkan untuk menjaga jarak setidaknya dua meter jika melakukan interaksi sosial. Kebijakan *physical distancing* di masa Covid-19 akhirnya mengharuskan masyarakat untuk tidak melakukan kontak fisik dan menghindari kerumunan. Bahkan, di masa-masa awal penyebaran Covid-19 di Indonesia, pemerintah memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Alhasil, baik instansi, tempat kerja, maupun sekolah dan kampus diliburkan, kecuali instansi yang dianggap strategis. Masyarakat juga dibatasi untuk mengunjungi fasilitas umum dan menggelar kegiatan sosial.

Meski instansi, tempat kerja, sekolah dan kampus diliburkan, namun masyarakat tetap melakukan rutinitasnya hariannya. Hanya saja dikerjakan secara daring. Meski saat ini interaksi sosial sudah mulai dilonggarkan, dan masyarakat sudah mulai bekerja bekerja di institusi dan tempat kerja masing-masing —tapi imbauan menerapkan protokol kesehatan masih diberlakukan— namun sekolah dan kampus masih tetap diliburkan. Sehingga baik peserta didik masih melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Pembelajaran daring tak bisa dipungkiri, adalah alternatif terbaik untuk saat ini agar kegiatan pembelajaran tetap berlangsung

di tengah pandemi. Kebijakan ini tak hanya diberlakukan di Indonesia saja, namun juga diterapkan seluruh dunia, akibat Covid-19. Berdasarkan pantauan UNESCO, lebih dari 100 negara telah menutup lembaga pendidikan secara nasional, dan pembelajaran digelar secara daring (*en.unesco.org*)

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan dan dialami melalui internet baik secara sinkron maupun asinkron. Dilakukan secara sinkron bahwa antara pendidik dan peserta didik melakukan pembelajaran daring pada saat yang sama tapi tidak harus bergantung pada lokasi fisik untuk berpartisipasi secara *online*. Sementara maksud dari asinkron adalah, bahwa pembelajaran bisa dilakukan tanpa perlu hadir secara bersama baik *online* maupun secara fisik (Singh dan Thurman, 2019). Pembelajaran daring secara sinkron biasanya dilakukan melalui konferensi video dengan menggunakan aplikasi Zoom, misalnya, atau belajar melalui *streaming*. Sementara belajar asinkron, guru biasanya mengirimkan modul, catatan kuliah, atau video pembelajaran pada peserta didik untuk dipelajari secara mandiri. Jadi setiap konten materi bisa dipelajari kapan saja. Meski ada dua jenis pembelajaran dalam pembelajaran daring, namun esensinya tetap sama, yakni pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Peserta didik dan

pendidik dihubungkan melalui internet agar pembelajaran dapat berlangsung.

Berdasarkan pada definisinya, maka tak heran jika pembelajaran daring dijadikan sebagai alternatif untuk menggantikan pembelajaran langsung atau tatap muka di masa pandemi. Adanya kebijakan untuk melakukan jaga jarak, membuat kegiatan pembelajaran di setiap lembaga pendidikan dilakukan secara jarak jauh. Hal tersebut sangat dimungkinkan melalui pembelajaran daring, asalkan fasilitas internet memadai dan peserta didik maupun guru memiliki sarana teknologi informasi seperti computer, gawai, dan lainnya. Namun, bukan berarti penerapan pembelajaran daring di era COVID-19 tanpa permasalahan. Berdasarkan penelitian tentang pembelajaran daring di masa COVID-19 di Cina, negara yang pertama kali kena imbas pandemi, ternyata banyak orangtua murid yang memandang pembelajaran daring secara negatif. Pembelajaran daring dinilai kurang efektif untuk anak usia dini dibanding pembelajaran tradisional. Mereka memandang suasana belajar dan interaksi sosial anak menjadi kurang jika kegiatan belajar digelar secara daring (Donga et al, 2020).

Sejumlah penelitian di Indonesia juga menunjukkan adanya pandangan yang cenderung negatif terhadap pembelajaran daring. Penelitian yang dilakukan Lutfia

(2020) misalnya menunjukkan sejumlah orangtua peserta didik di pedesaan memiliki persepsi negatif terhadap pembelajaran daring karena adanya banyak kendala yang mereka keluhkan. Orangtua peserta didik tidak siap mendampingi anak dalam pembelajaran daring karena mereka harus bekerja sebagai buruh tani atau di pabrik, ketidaksiapan peserta didik dalam pembelajaran daring, dan orangtua peserta didik memandang pembelajaran daring membuat interaksi antara peserta didik dan guru menjadi kurang.

Bahkan guru pun memiliki persepsi negatif terhadap pembelajaran daring. Penelitian yang dilakukan Putria dkk (2020) menunjukkan, banyak guru sekolah dasar yang memandang pembelajaran daring kurang efektif karena guru kurang maksimal dalam memberikan materi sehingga materi kadang tak tuntas disampaikan. Hal menarik dari penelitian tersebut adalah, guru mengungkap jika banyak dari peserta didiknya yang tak memiliki gawai sehingga kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kendala sarana juga dikeluhkan oleh orangtua murid berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan Lutfia. Orangtua peserta didik menyebut, anak-anaknya tak memiliki gawai dan koneksi internet membuat peserta didik kesulitan melakukan kegiatan pembelajaran secara daring.

Maka bukan hanya proses dan hasil pendidikan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat dalam pembelajaran daring, namun juga sarannya baik itu ketaktersediaan gawai, komputer, dan kuota internet, maupun koneksi internet yang tidak memadai. Masalah inilah yang saya akan ulas secara mendalam pada kajian ini. Kenapa ini penting diulas? Karena banyaknya peserta didik yang tak memiliki sarana pembelajaran daring, tak mampu membeli kuota internet, dan wilayahnya tak didukung koneksi internet yang baik, sekaligus memperlihatkan bentuk kesenjangan digital yang cukup serius di Indonesia. Sebenarnya publik sudah lama menyoroti masalah kesenjangan digital, saat pembelajaran daring diberlakukan selama masa pandemi. Namun, kritik terhadap pembelajaran daring dan masalah kesenjangan digital seharusnya ditarik lebih jauh lagi dalam hubungannya dengan pendidikan. Bahwa kesenjangan tersebut tak hanya membuat peserta didik sulit mendapatkan pendidikan maksimal dibanding peserta didik lainnya, tapi juga membuat mereka kesulitan bersaing dengan peserta didik lain di dunia pendidikan kita yang penuh kompetisi ala pendidikan neoliberal.

Pembelajaran Daring dan Kesenjangan Digital

Van Dijk (dalam Van Deursen dan Van Dijk, 2010) mengatakan, istilah

“kesenjangan digital” awalnya mengacu pada kesenjangan dalam akses ke komputer. Ketika internet berkembang dengan cepat di dalam masyarakat istilah tersebut berkembang tidak hanya kesenjangan dalam akses ke komputer, namun juga kesenjangan dalam akses ke internet. Meski demikian, menurut Van Deursen dan Van Dijk (2010) hal yang juga penting dalam kesenjangan digital adalah perbedaan kepemilikan keterampilan digital. Jika hendak disederhanakan, maka kesenjangan digital adalah ketidaksetaraan dalam mengakses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baik kesenjangan kepemilikan TIK, kesenjangan menguasai penggunaan TIK, maupun kesenjangan dalam mengakses internet.

Lebih detail Keniston dan Kumar (2003) menguraikan empat macam kesenjangan digital yakni Pertama, kesenjangan digital yang terjadi di seluruh dunia baik di negara industri atau negara berkembang, antara orang kaya, terpelajar, berkuasa dengan mereka yang tidak berada di posisi itu. Kedua, kesenjangan dalam hal bahasa dan budaya. Mereka yang berbahasa tertentu misalnya berbahasa Inggris atau Eropa dan budaya tertentu ternyata lebih besar peluangnya dalam mengakses TIK. Ketiga, kesenjangan antara negara kaya dengan negara miskin. Keempat, kesenjangan di antara mereka

yang memiliki kemampuan dan pengetahuan sehingga dapat mengendalikan TIK dalam masyarakat.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan dalam pembelajaran daring adalah, banyak peserta didik yang tak mampu memiliki sarana TIK bahkan sulit membeli kuota internet. Jika menggunakan teori Keniston dan Kumar, terjadinya kesenjangan digital dalam hal kepemilikan sarana TIK terjadi akibat ekses dari kesenjangan sosial-ekonomi yakni ketidaksetaraan antara orang miskin dan kaya. Mereka yang miskin kesulitan memiliki sarana TIK guna mengikuti pembelajaran daring. Kesenjangan ekonomi dari dulu selalu menjadi masalah klise di Indonesia. Bahkan sampai sekarang masih terus meningkat. Berdasarkan data BPS, tingkat ketimpangan di Indonesia yang diukur menggunakan gini rasio sebesar 0,381. Pada Maret 2020. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan gini rasio per September 2019 yang tercatat sebesar 0,380. Meski demikian, ketimpangan menurun 0,001 jika dibandingkan dengan Maret 2019 (*katadata.co.id*, 15/7/2020).

Hal tersebut jika dilihat dari rasio gini. Bagaimana jika kesenjangan dilihat berdasarkan dari nilai kekayaan? Mengenai hal tersebut, Oxfam punya catatan yang menarik. Menurut Oxfam, pada 2017, harta milik empat orang

terkaya di Indonesia sama dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin di Indonesia. (*bbc.com*, 23/2/2017). Hal tersebut menunjukkan lebarnya jurang kesenjangan di Indonesia. Yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Kemiskinan memang bukanlah hal baru di Indonesia. Bahkan selalu saja meningkat. Terbaru, data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta jiwa, meningkat 1,63 juta jiwa dibandingkan September 2019, dan meningkat sebesar 1,28 juta jiwa terhadap Maret 2019 (*bps.go.id*, 15/7/2020)

Kini, Covid-19 menjadi masalah baru Indonesia, yang menciptakan krisis ekonomi yang cukup serius. Ekonomi rumah tangga masyarakat pastinya ikut terkena dampak Covid-19, dan hal tersebut sudah mulai Nampak. Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) 71 persen masyarakat menilai ekonomi rumah tangga mereka memburuk saat Pandemi Covid-19 (*katadata.co.id*, 25/6/2020). Masyarakat kaya mungkin tak terlalu terpengaruh oleh dampak ekonomi dari Covid-19, meski tidak lebih baik dibanding sebelum Pandemi Covid-19. Namun, orang-orang miskin pasti sangat merasakan dampak tersebut, karena dari awal mereka tak memiliki kekuatan ekonomi yang cukup untuk bertahan di tengah pandemi.

Jurang lebar kesenjangan ekonomi, kemiskinan yang meningkat, dan ekonomi yang memburuk di masa pandemi, pastinya semakin memperkuat kebenaran tentang sulitnya masyarakat miskin memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya saat pemerintah menerapkan pembelajaran daring sebagai alternatif pembelajaran di masa Covid-19. Mereka harus memiliki gawai, komputer, laptop, membeli kuota internet, dan belum lagi harus memenuhi kebutuhan pendidikan lainnya. Sementara ekonomi yang sejak awal sudah buruk kini semakin memburuk. Pada sisi yang lain, masyarakat menengah atas masih bisa tetap mengikuti pembelajaran daring dengan mudah dan lancar, karena masih bisa mengadakan sarana penunjangnya. Kesenjangan digital yang menjadi permasalahan dalam pembelajaran daring tak lepas dari kesenjangan ekonomi. Hal tersebut sekaligus menyimpulkan, pembelajaran daring lebih berpihak dan menguntungkan orang kaya ketimbang orang miskin.

Kesenjangan digital tersebut akhirnya menghasilkan ketidakmerataan akses peserta didik dalam pembelajaran daring. Pada April 2020 lalu INOVASI melakukan riset terhadap 300 orangtua peserta didik sekolah dasar di 18 kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, dan Jawa Timur. Hasil

survei tersebut menunjukkan adanya ketimpangan akses media pembelajaran pada anak-anak dari keluarga ekonomi mampu dan kurang mampu. Hanya 28 persen responden yang menyatakan anak mereka belajar menggunakan media daring. Jika dilihat dari segi provinsi, semakin kecil provinsi tersebut semakin kecil presentase peserta didik yang mendapatkan pembelajaran daring. (*theconversation.com*, 2/5/2020).

Meskipun sanggup memiliki sarana TIK dan membeli kuota, tapi masalah lain masih tetap menghantui: bagaimana dengan infrastruktur internet Indonesia? Apakah sudah memadai dan merata? Jawabannya, tidak benar. Pembelajaran daring di era Covid-19 juga menunjukkan kesenjangan digital lainnya, yakni kesenjangan sinyal internet yang cukup parah. Sebenarnya kesenjangan internet juga bukan hal baru di Indonesia. Namun, ia kemudian mulai marak disoroti saat ketimpangan akses internet tersebut sangat berdampak pada implementasi pembelajaran daring. Kehadiran Covid-19 memperlihatkan dengan jelas dampak negative ketimpangan digital yang sebenarnya sejak awal harus diselesaikan pemerintah ketika pemerintah berambisi ingin menuju perubahan ke Revolusi Industri 4.0.

Coba bayangkan, secara nasional baru 93 persen wilayah Indonesia yang

terjangkau sinyal seluler, itu pun dengan kualitas sinyal yang berbeda. Komposisinya adalah, 4G 59 persen, 3G 26 persen, 2G 8 persen, dan sisanya 7 persen GSM atau hanya bisa melakukan telepon dan SMS, tanpa data. Bahkan di Papua, baru 47 persen wilayahnya yang mendapatkan sinyal untuk akses internet. (*lokadata.id*, 19/8.2020). Otomatis, peserta didik-peserta didik yang tinggal di daerah pedalaman dan terluar yang kualitas sinyal buruk bahkan tak ada sama sekali, akan kesulitan mengakses pendidikan melalui pembelajaran daring jika dibandingkan peserta didik yang tinggal di perkotaan atau di wilayah yang memiliki sinyal internet yang bagus. Lagi-lagi, kesenjangan digital dalam hal ketimpangan mengakses sinyal sekaligus menghasilkan ketimpangan mengakses pendidikan pada anak-anak Indonesia di masa Covid-19.

Pembelajaran Daring dan Kompetisi yang Timbang

Berdasarkan penjelasan di atas, kesenjangan digital membuat kaum miskin dan masyarakat pelosok kesulitan mendapatkan pendidikan yang maksimal dibanding dengan masyarakat yang lebih mudah mengakses sarana digital. Karena mereka sudah kesulitan mendapatkan akses ke pembelajaran daring. Ekseksnya, masyarakat miskin dan pelosok, karena tak diuntungkan oleh situasi, membuat mereka

berpotensi besar tertinggal dibanding peserta didik-peserta didik lainnya dalam sistem pendidikan neoliberal yang kompetitif sekarang ini. Kai (2012) mengatakan di zaman sekarang pendidikan penuh dengan persaingan bahkan hampir tak ada sistem pendidikan tanpa persaingan. Namun kompetisi yang dulunya hanya sebagai fenomena normal sekarang sudah terdistorsi menjadi kompetisi pendidikan yang ekstrim. Lebih lanjut Kai mengatakan, setidaknya ada dua bentuk kompetisi yakni pemeringkatan dan seleksi. Peserta didik diberikan peringkat berdasarkan nilai ujian baik ujian akhir, ujian semester, maupun ujian bulanan. Peringkat kemudian akan membelah peserta didik dalam dua kutub: peserta didik yang unggul dan peserta didik yang tidak unggul. Penyeleksian tersebut akan bergantung pada peringkat peserta didik dan sekolah menjadi kunci untuk memilih yang terbaik.

Pembelajaran daring dalam pendidikan neoliberal yang kompetitif sekarang ini jelas akan semakin menunjukkan persaingan yang tidak sehat. Peserta didik-peserta didik yang tak memiliki akses ke dunia digital pasti akan kalah dan jauh tertinggal dari mereka yang lebih mudah mengakses dunia digital. Mereka yang hendak menyerap pengetahuan dari gurunya demi nilai ujian dan peringkat yang terbaik di kemudian

hari, harus mengubur dalam-dalam mimpinya itu karena tak bisa mengikuti pembelajaran daring. Sementara peserta didik lainnya bisa melangkah lebih maju dibanding peserta didik yang tak memiliki akses ke pembelajaran daring. Jika pembelajaran daring diteruskan, hanya si kaya dan masyarakat perkotaan yang bisa menang dalam kompetisi yang timpang ini.

Lebarnya jurang ketimpangan di Indonesia selalu membuat model pendidikan kompetitif sebagai arena untuk orang-orang yang kuat secara ekonomi. Karena sifatnya sebagai arena persaingan, maka selalu ada pemenang, dan pemenangnya adalah orang-orang yang lebih diuntungkan secara ekonomi, dan kadang pula secara geografis, politik dan pendidikan. Persis seperti persaingan pasar bebas neoliberal dimana yang hanya kuat secara ekonomi, sosial, dan politik yang akan menang. Kecenderungan neoliberal tersebut tertular dalam sistem pendidikan kita, dan mengubah wajah pendidikan sebagai bisnis, pencetak robot-robot pekerja, dan arena persaingan bebas antar peserta didik dan lembaga pendidikan untuk menjadi pemenang.

Yamin (2009) mengatakan, paham neoliberal adalah liberalisasi perdagangan dan *finance*, biarkan pasar menentukan harga, mengakhiri inflasi, stabilisasi ekonomi makro, privatisasi, dan

pemerintah harus menyingkir dan tak boleh menghalangi jalan. Neoliberalisme menjelma dalam aturan otonomi pendidikan yang digulirkan pemerintah, yang sebenarnya hanya menyerahkan pendidikan kepada pasar. Komersialisasi pendidikan pun terjadi. Sekolah-sekolah mematok harga sangat tinggi untuk bisa dimasuki. Sebuah usaha yang hanya mencekik rakyat miskin.

Karena pendidikan sudah disusupi paradigma neoliberal, maka ia juga menjadi arena bagi para murid untuk berkompetisi menjadi pemenang. Sang pemenang akan diberi peringkat sebagai yang terbaik berdasarkan hasil ujian. Namun, kompetisi ini sudah akan dimenangkan oleh mereka yang diuntungkan oleh situasi. Terkait hal tersebut, Nuryatno (2008:71) mengatakan, sesuai dengan paradigma berpikir neoliberal, dalam kompetisi harus ada pemenang (*winner*) dan pecundang (*looser*), tak peduli bagaimana kompetisi tersebut digelar. Ketika ideologi kompetisi ini dijadikan sebagai basis pendidikan, maka *output* pendidikan kita hanya akan menghasilkan pemenang dan pecundang. Kita tidak sadar bahwa ideologi kompetisi yang diciptakan neoliberal sebenarnya didesain untuk kepentingan pemenang. Karena yang mendesain, menyebarkan, dan mendesak ke publik adalah para pemenang, yaitu mereka yang kuat secara

ekonomi, politik, pendidikan, dan modal.

Namun, di sisi lain, Nuryatno (2008:70) memahami bahwa sistem kompetisi sebenarnya dapat memberi manfaat, baik individual maupun sosial, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Anak yang sudah kuat dan mapan dalam ekonomi, pendidikan, dan modal, tentu tidak fair jika berkompetisi dengan mereka yang lemah. Ini bukan kompetisi yang sehat, tapi bisa jadi malah eksploitasi dan kontraproduktif. Nah, sistem kompetisi yang timpang, eksploitatif, dan kontraproduktif inilah yang kita saksikan sekarang dalam pembelajaran daring di masa Covid-19.

Tak usah mengambil contoh yang jauh untuk melihat buruknya sistem persaingan yang tidak fair dalam pendidikan di Indonesia. Ujian Nasional (UN) misalnya —meski sudah berencana dihilangkan— sejak dari dulu dikritik karena menjadi ajang kompetisi yang tidak sehat. Pada sekolah-sekolah perkotaan Jawa yang didukung infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang bagus, sehingga distribusi bahan ajar dan guru pun tidak menjadi masalah, mereka tidak akan terlalu dirugikan oleh UN. Tapi bagi sekolah-sekolah yang berada di pelosok daerah yang infrastruktur transportasi dan telekomunikasinya buruk, UN itu akan menjadi problem besar. Terlebih bagi anak-anak yang hidup di pulau terluar (Darmaningtyas dan

Subkhan, 2012: 169).

Ringkasnya adalah, ketimpangan di Indonesia akan membuat sistem persaingan dalam pendidikan berjalan secara tidak adil, akibat ketidaksetaraan itu. Kini, pemerintah memberlakukan pembelajaran dan sudah dilaksanakan selama tujuh bulan. Selama tujuh bulan itu banyak peserta didik yang tak mendapatkan hak pendidikannya secara maksimal karena ketidakmampuan memiliki sarana TIK dan koneksi internet yang buruk di daerahnya. Mereka sudah dekat dengan kekalahan dari orang-orang yang kuat secara ekonomi, yang diuntungkan secara geografis. Apalagi melalui pembelajaran daring, guru lebih banyak memberikan beban tugas kepada peserta didiknya untuk memenuhi beban kurikulum. Peserta didik dipaksa untuk berlomba-lomba menyelesaikan tugas saat jurang kesenjangan digital sangat lebar.

Tentu saja, si miskin dan peserta didik di daerah pedalaman dan terluar tak bisa mengerjakan tugas sesempurna mereka yang diuntungkan oleh situasi. Bahkan, mungkin banyak di antara mereka yang sama sekali tak mengerjakan tugas, karena tak bisa mengakses tugas yang dikirim secara daring. Kembali mengutip hasil riset dari INOVASI, ternyata banyak peserta didik yang tak mengerjakan tugas selama pembelajaran daring, dan anak-anak yang sama sekali tidak diberikan

tugas oleh sekolah mayoritas adalah anak petani (47%) dan orang tuanya hanya berpendidikan SD (47%) (*theconversation.com,2/5/2020*).

Pembelajaran daring di tengah situasi yang timpang membuat banyak anak-anak tak terpenuhi hak pendidikannya, hingga mereka bisa tertinggal dari si kaya dan anak-anak perkotaan, yang memang sudah selalu seperti itu. Karena budaya persaingan dalam pendidikan neoliberal selalu menguntungkan mereka yang kuat secara ekonomi, politik, pendidikan, dan modal.

Beberapa di antaranya mereka yang tak diuntungkan oleh situasi, punya keinginan kuat untuk terus mengikuti pembelajaran agar kualitas pendidikannya tidak terpuruk. Namun, kita bisa menyaksikan mereka bersusah payah mengikuti pembelajaran daring agar tak tertinggal dalam pembelajaran, agar bisa memenuhi beban yang diberikan oleh kurikulum, agar posisinya tak berada di bawah peserta didik lainnya dalam nilai ujian dan penguasaan materi. Bagi yang tak diuntungkan secara geografis, mereka terus berjuang mencari tempat-tempat ketinggian agar bisa mengakses sinyal internet. Tapi hal tersebut bukan hal mudah. Situasi tersebut sudah memakan banyak korban dan hal tersebut menjadi salah satu bahaya dari sistem kompetisi di tengah banyaknya beban tugas dalam

pembelajaran daring, di tengah kesenjangan digital yang cukup parah. Diketahui pada 17 Oktober 2020, salah satu peserta didik kelas 2 SMAN 18 Gowa tewas sesudah meminum racun karena tugas sekolah terlalu banyak namun ia sulit mendapatkan sinyal internet (*vice.com, 2/11/2020*).

Belum lama ini juga salah satu mahapeserta didik dari Sinjai, Sulawesi Selatan meninggal terjatuh dari menara masjid saat sedang mencari sinyal internet untuk keperluan pembelajaran daring (*makassar.terkini.id, 8/5/2020*). Kasus-kasus ini seharusnya sudah menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mengevaluasi banyak hal terkait pembelajaran daring: perbaikan infrastruktur, menyederhanakan kurikulum. Pembelajaran daring ini juga seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengevaluasi sistem pendidikan kita yang kompetitif sekaligus meracik model pendidikan masa depan yang lebih baik.

PENUTUP

Memikirkan Model Pendidikan yang Manusiawi

Berdasarkan pengalaman dalam implementasi pembelajaran daring, pemerintah seharusnya mulai berpikir untuk segera membenahi infrastruktur telekomunikasi dan membuatnya merata

hingga ke daerah pedalaman dan terluar. Jika Indonesia punya ambisi besar menuju Revolusi Industri 4.0, seharusnya masalah sinyal internet sudah tidak ada lagi saat menerapkan pembelajaran daring. Tapi pada kenyataannya, jaringan internet yang masih susah khususnya di wilayah terpencil dan terluar, sehingga menyebabkan masalah dalam pembelajaran daring. Begitupun dengan masalah kesenjangan ekonomi sebagai salah satu sebab terjadinya kesenjangan digital. Menyelesaikan kesenjangan ekonomi memang bukan hal mudah, tapi bukan berarti mustahil untuk diselesaikan. Hanya butuh keseriusan pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal untuk kestabilan ekonomi, dan memberantas korupsi. Pemerintah punya kewajiban untuk melakukan hal tersebut memang peduli terhadap masa depan masyarakatnya.

Hal yang tak kalah penting adalah mengurangi sistem kompetisi di sekolah. Kata “mengurangi” mengisyaratkan bahwa sistem kompetisi tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, apalagi di sisi lain ia punya manfaat. Namun, setidaknya di tingkat SD, sistem kompetisi sudah harus ditiadakan, dan lebih diperbanyak penanaman nilai-nilai kemanusiaan berupa saling menghargai, rasa bertanggungjawab, rasa kesetaraan, nilai-nilai welas asih, atau kita bisa menyebutnya sebagai model

pendidikan yang manusiawi. Agar ketika peserta didik masuk di sekolah menengah, mereka sudah bisa saling menghargai dan tidak melakukan pengucilan pada teman-temannya yang nilai dan kemampuan akademiknya tak terlalu bagus. Artinya, di tingkat SMA kompetisi sudah tidak lagi menjadi beban karena kedewasaan sudah terbangun sejak SD. Pendidikan yang manusiawi ini sudah harus menjadi proyek pendidikan masa depan pemerintah.

Meski tak perlu meniru sepenuhnya sistem pendidikan Finlandia karena konteks negara yang berbeda, namun prinsip pendidikan di sana perlu ditiru, karena pelaksanaannya mencerminkan model pendidikan yang manusiawi. Ratih D. Adiputri, menceritakan pengalamannya menyekolahkan anaknya di Finlandia, yang ia bukukan dengan judul *Sistem Pendidikan Finlandia: Catatan dan Pengalaman Seorang Ibu* (2019). Adiputri menceritakan, di kelas 1 SD tak ada penilaian berupa angka untuk peserta didik. Hanya kalimat motivasi untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Penilaian berupa angka baru diadakan pada kelas 3 SD dan seterusnya. Itu pun sistem penilaian tersebut dimaksudkan sebagai penilaian untuk melihat peningkatan diri sendiri dan tidak dibandingkan dengan yang lain. Karena rapornya tak diberi *ranking*, hanya sekadar penilaian saja. Jadi

peserta didik tak tahu siapa yang memiliki peringkat paling atas dibanding peserta didik lainnya. Meski ada penilaian, namun penilaian tersebut tidak dimaksudkan sebagai ajang kompetisi.

Berbeda dengan di Indonesia, dengan sistem *ranking* yang menjadi pembandingan peserta didik dengan lainnya, kadang hanya jadi beban bagi peserta didik. Sebab, sistem kompetisi tersebut membuat peserta didik dipaksa oleh orangtuanya untuk lebih giat belajar hanya untuk mengejar peringkat. Karena peringkat sudah menyangkut rasa bangga dan rasa malu peserta didik dan orangtuanya. Namun masalahnya, pemaksaan ini kadang berujung kerusakan psikologi anak. Di Finlandia juga, berdasarkan pengalaman Ratih, tak ada ujian nasional di tingkat sekolah dasar. Ujian nasional dalam bentuk tes martikulasi hanya dilakukan di SMA. Jadi guru diberikan kebebasan untuk memberi penilaian, yang sekali lagi hanya untuk pengukuran pribadi bukan untuk kompetisi.

Belakangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia yang baru, Nadiem Makarim mulai menerapkan sistem demikian melalui program Merdeka Belajar. Penilaian akan diserahkan ke guru masing-masing. Namun, di Finlandia, pemerintah berani menerapkan kebijakan tersebut, karena kualitas guru sudah tak

diragukan lagi. Mereka menyeleksi gurunya dengan sangat ketat dan harus memiliki jenjang pendidikan magister. Berbeda di Indonesia, kualitas gurunya masih dipertanyakan. Kenapa itu penting? Karena kualitas guru akan menentukan baik-buruknya model evaluasi bagi peserta didik.

Adiputri juga menceritakan, jika aspek interaksi sosial juga menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi pendidikan di Finlandia. Apakah sang peserta didik punya teman, atau ada sering mengganggu, pertanyaan seperti itu sering diajukan guru untuk melihat tingkat interaksi peserta didik. Bagi Adiputri (2019:53), dan saya juga menyepakatinya, “pertanyaan-pertanyaan mengenai interaksi sosial seperti di atas juga baik, karena menstimulus peserta didik memiliki interaksi sosial yang bagus dengan menunjukkan kepedulian dengan teman sebaya, para pengajar, dan orang-orang di lingkungan sekolah”. Hal tersebut bagi saya penting untuk mengurangi tingkat persaingan antar peserta didik. Hubungan sosial yang sudah terlatih sejak SD akan membuat peserta didik bisa saling menghargai, simpati, dan meminimalisasi perlakuan *bully*. Sehingga, ketika ada peserta didik yang tak memiliki kemampuan akademik dan tingkat pemahaman yang cukup baik dibanding peserta didik lainnya, mereka sudah tidak

takut lagi dengan perilaku *bully* dan cap “bodoh”, karena peserta didik sudah terbiasa untuk saling menghargai. Di Indonesia, hal tersebut masih menjadi PR yang besar. Kita selalu menggembar-gemborkan tentang pendidikan karakter, tapi masih ada saja kekerasan di sekolah, maupun perilaku *bully* yang bisa mematikan motivasi belajar peserta didik.

Begitu manusiawinya pendidikan Finlandia, pendekatan pembelajaran yang dipraktikkan lebih lunak. Seperti yang diungkapkan Timothy D. Walker (2017) bahwa di Finlandia, beban sekolah lebih pendek, pekerjaan rumah lebih ringan, dan tes dengan standar tertentu lebih sedikit. Finlandia menunjukkan pada seluruh dunia, jika masih ada cara lain dalam menjalankan pendidikan tanpa mempersempit kurikulum dan menambah beban guru dan murid. Saya berpikir, lunaknya sistem pembelajaran dalam pendidikan Finlandia adalah konsekuensi dari kurangnya sistem kompetisi. Sehingga tak ada ambisi untuk memaksakan peserta didik belajar dengan cepat dan padat. Karena tak ada alasan untuk memaksa peserta didik saling bersaing meraih yang terbaik dan terdepan. Peserta didik memang punya hak untuk berprestasi dan itu perlu. Namun, tak seharusnya dijadikan pemacu peserta didik untuk memasuki dunia kompetisi yang kadang timpang dan diskriminatif.

Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, bahkan dipersiapkan sejak dini untuk dirancang sebagai proyek pendidikan masa depan, disamping juga mempertimbangkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, juga menjadikan pendidikan diakses secara gratis untuk masyarakat. Karena hal tersebut ternyata bukan sesuatu yang mustahil. Finlandia berhasil melakukannya. Jika sistem kompetisi sudah ditiadakan, pendidikan diakses secara gratis, juga sarana dan prasarana memiliki kualitas yang sama antar sekolah, maka jadilah pendidikan ideal yang dicita-citakan oleh semua orang: pendidikan yang manusiawi, tanpa persaingan yang timpang, tanpa diskriminasi, tanpa beban, dan menjunjung tinggi kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputri, R. D. 2019. *Sistem Pendidikan Finlandia: Catatan dan Pengalaman Seorang Ibu*. Jakarta: KPG
- Darmaningtyas dan Subkhan, E. 2012. *Manipulasi Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Resist Book
- Donga, C, Cao, S, dan Li, H. 2020. *Young children's online learning during COVID-19 pandemic: Chinese parents' beliefs and attitudes*. Children and Youth Services Review, 118. 1-9, <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105440>

- Kai, J. 2012 *The Origin and Consequences of Excess Competition in Education*. Chinese Education & Society. 45(2) 8-20, <http://dx.doi.org/10.2753/CED1061-1932450201>
- Keniston, K dan Kumar, D. 2003. *The Four Digital Divide*. Delhi:Sage Publishers.
https://www.academia.edu/29796703/The_four_digital_divides
- Lutfia, S. Z. 2020. *Persepsi Orang Tua Mengenai Pembelajaran Online di Rumah Selama Pandemi Covid-19*. Dialektik. 2(2). 69-73. <https://journal.umbjm.ac.id/index.php/idealektik/article/view/554>
- Nuryatno, M. A. 2008. *Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik, dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book
- Putria, H, Maula, L.H, Uswatun, D.A. 2020. *Analisis proses pembelajaran dalam jaringan (daring) masa pandemi Covid-19 pada guru sekolah dasar*. Jurnal Basicedu, 4(4). <https://doi.org/10.31004/basicedu.v4i4.460>
- Singh, V dan Thurman, A. 2019 *How Many Ways Can We Define Online Learning? A Systematic Literature Review of Definitions of Online Learning (1988-2018)*. American Journal of Distance Education. 33(4). 289-306. <https://doi.org/10.1080/08923647.2019.1663082>
- Van Deursen dan Van Dijk. 2010. *Internet Skills and Digital Divide*. Journal New Media and Society. Volume 13(6) 893–911
- Walker, T. D. 2017. *Teach Like Finland: 33 Strategi Sederhana untuk Kelas yang Menyenangkan*. Jakarta:Grasindo
- Yamin, M 2009. *Menggugat Pendidikan Indonesia: Belajar dari Paulo Freire dan Ki Hajar Dewantara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Internet**
<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/30/07431111/hingga-29-oktober-kasus-Covid-19-di-indonesia-ada-404048-kasus-aktif-60569?page=all>
- <https://en.unesco.org/news/Covid-19-educational-disruption-and-response>
- <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f0eb43f9be92/masyarakat-bawah-paling-terimbas-corona-ketimpangan-naik-pada-maret>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39060857>
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html>
- <https://katadata.co.id/agungjatmiko/berita/5ef47ac5cd60b/smrc-71-masyarakat-nilai-ekonomi-rumah-tangga-memburuk-saat-pandemi>
- <https://theconversation.com/riset-dampak-Covid-19-potret-gap-akses-online-belajar-dari-rumah-dari-4-provinsi-136534>
- <https://lokadata.id/artikel/kesenjangan-sinyal-dari-indonesia-timur>
https://www.vice.com/id_id/article/n7vvdK/tiga-pelajar-indonesia-bunuh-diri-diduga-depresi-akibat-pembelajaran-jarak-jauh-pjj
<https://makassar.terkini.id/pembelajaran-daring-kembali-memakan-korban-mahapeserta didik-meninggal-jatuh-dari-menara-masjid/>